

Tersedia Online di <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/JMPKP>
ISSN Print : [2685-7499](http://dx.doi.org/10.26855/2685-7499) ISSN Online : [2745-8660](http://dx.doi.org/10.26855/2745-8660)

Literasi Politik dan Rasionalitas Pemilih dalam Pemilihan Anggota Legislatif di Kota Sorong

Roman Hadi Saputro¹, Hedy Mahulette²

¹Ilmu Pemerintahan, ²Manajemen, Universitas Terbuka, Jl. Cabe Raya Pondok Cabe, Kota Tangerang Selatan, 15417, Indonesia.

[*roman@ecampus.ut.ac.id](mailto:roman@ecampus.ut.ac.id)

Article History:

Received	: 09/01/2026
Received in revised form	: 22/02/2026
Accepted	: 11/08/2026

Abstract: Political literacy is a crucial factor in shaping voter rationality within an electoral democracy. This article analyzes the level of political literacy and its relationship with voter rationality in the 2019 Legislative Election in Sorong City. The study employs a quantitative descriptive approach using a survey of 399 voters, with data collected through structured questionnaires. The findings indicate that political literacy among the public remains largely procedural and has not yet developed into a substantive understanding, particularly regarding the functions and roles of legislative institutions. This condition has direct implications for voter rationality, as electoral choices tend to be based on non-programmatic considerations, such as personal proximity, the influence of local elites, and transactional political practices. Further analysis shows that voters with higher levels of political literacy demonstrate more rational voting behavior by prioritizing candidates' programs and track records in their decision-making process. The study argues that political literacy is not merely correlated with voter rationality, but functions as a structural prerequisite for the formation of rational voters and the strengthening of local democratic quality. Therefore, enhancing political literacy constitutes a strategic agenda for promoting more substantive electoral democracy at the local level.

Keywords: Literacy; Rationality; Voters; Elections; Democracy.

Abstrak: Literasi politik merupakan faktor penting dalam membentuk rasionalitas pemilih dalam demokrasi elektoral. Artikel ini menganalisis tingkat literasi politik masyarakat serta keterkaitannya dengan rasionalitas pemilih dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 di Kota Sorong. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif melalui survei terhadap 399 pemilih dengan instrumen kuesioner terstruktur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa literasi politik masyarakat masih berada pada level prosedural dan belum berkembang secara substantif, terutama dalam pemahaman fungsi dan peran lembaga legislatif. Kondisi tersebut berimplikasi langsung pada rendahnya rasionalitas pemilih, yang tercermin dari kecenderungan memilih berdasarkan pertimbangan non-programatik, seperti kedekatan personal, pengaruh tokoh lokal, dan praktik politik transaksional. Analisis temuan menunjukkan bahwa pemilih dengan tingkat literasi politik yang lebih baik cenderung memperlihatkan perilaku memilih yang lebih rasional dengan menjadikan program kerja dan rekam jejak kandidat sebagai dasar pengambilan keputusan. Studi ini menegaskan bahwa literasi politik tidak hanya berkorelasi, tetapi berperan sebagai prasyarat struktural bagi terbentuknya rasionalitas pemilih dan penguatan kualitas demokrasi lokal. Oleh karena itu, penguatan literasi politik masyarakat menjadi agenda strategis dalam mendorong demokrasi elektoral yang lebih substantif di tingkat lokal.

Kata kunci: Literasi; Rasionalitas; Pemilih; Pemilu; Demokrasi.

PENDAHULUAN

Literasi politik dapat dipandang sebagai salah satu pilar penting dalam pembentukan warga negara yang mampu terlibat secara aktif dan bermakna dalam kehidupan demokratis. Dalam konteks demokrasi elektoral, literasi politik tidak semata-mata berkaitan dengan pemahaman teknis mengenai tahapan dan prosedur pemilu, melainkan juga mencakup kemampuan warga untuk membaca dan memahami isu-isu publik, bersikap kritis terhadap aktor politik, serta menautkan pilihan politik yang diambil dengan kepentingan kolektif dalam jangka panjang (Farikiansyah et al., 2024). Dengan tingkat literasi politik yang memadai, pemilih diharapkan tidak hanya bertindak sebagai peserta pasif dalam pemilu, tetapi mampu membuat keputusan politik secara rasional dan mandiri. Pada titik inilah demokrasi tidak lagi berhenti pada pemenuhan aspek prosedural semata, melainkan bergerak menuju demokrasi yang lebih substantif, yang menekankan kualitas representasi serta penguatan akuntabilitas politik.

Kajian mengenai perilaku pemilih, rasionalitas kerap dimaknai sebagai kemampuan individu dalam mengambil keputusan politik secara sadar, dengan mempertimbangkan informasi yang tersedia, program yang ditawarkan, serta rekam jejak para kandidat. Pemahaman ini bertumpu pada pendekatan rasional dalam ilmu politik yang melihat pemilih bukan sekadar sebagai objek mobilisasi, melainkan sebagai aktor yang memiliki kapasitas berpikir dan melakukan penilaian atas berbagai alternatif politik. Meski demikian, rasionalitas pemilih tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan informasional di sekitarnya. Kemampuan tersebut sangat dipengaruhi oleh tingkat akses pemilih terhadap informasi politik, sekaligus oleh kecakapan mereka dalam menafsirkan dan mengevaluasi informasi secara kritis (Ansori & M.Si., 2019; Arniti, 2020). Dalam kerangka ini, literasi politik menjadi faktor penentu yang membedakan antara pilihan politik yang lahir dari pertimbangan rasional dengan pilihan yang lebih didorong oleh dorongan emosional atau pertimbangan pragmatis sesaat.

Konteks di Indonesia, isu literasi politik menjadi semakin penting untuk dicermati, terutama ketika dihadapkan pada fakta tingginya tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu. Pemilu serentak tahun 2019, misalnya, menunjukkan angka partisipasi nasional yang cukup impresif. Namun demikian, berbagai kajian mengindikasikan bahwa tingginya kehadiran pemilih di bilik suara tidak secara otomatis mencerminkan kualitas pengambilan keputusan politik masyarakat.

Sejumlah pemilih masih menunjukkan keterbatasan pemahaman terkait fungsi lembaga legislatif, peran representatif wakil rakyat, maupun konsekuensi kebijakan yang melekat pada pilihan politik yang mereka tentukan (Malik et al., 2022). Situasi ini menegaskan adanya paradoks dalam praktik demokrasi elektoral di Indonesia, di mana semangat berpartisipasi belum sepenuhnya diimbangi dengan kapasitas rasional dan reflektif dalam menentukan pilihan politik.

Kesenjangan antara tingginya partisipasi elektoral dan mutu pilihan politik yang dihasilkan menjadi persoalan yang semakin rumit ketika ditelaah pada level lokal (Hasanuddin et al., 2021). Di berbagai daerah, khususnya di kawasan timur Indonesia, keterbatasan akses terhadap pendidikan serta informasi politik masih menjadi faktor penting yang memperlebar ketimpangan literasi politik antar kelompok masyarakat. Kota Sorong, sebagai pusat aktivitas ekonomi dan pemerintahan di Papua Barat Daya, menunjukkan dinamika sosial yang majemuk dengan mobilitas penduduk yang relatif tinggi. Situasi ini membentuk pola tersendiri dalam cara warga mengakses, menafsirkan, dan menggunakan informasi politik. Akibatnya, proses pembentukan preferensi politik berlangsung secara tidak merata, sehingga perkembangan literasi politik cenderung berbeda-beda di setiap lapisan masyarakat.

Faktor individu, lingkungan sosial, dan struktur kekuasaan lokal memengaruhi rasionalitas pemilih dalam sosial-politik Kota Sorong. Selain itu, tokoh adat juga memainkan peran krusial di dalamnya (Irliandi et al., 2023), tokoh agama (Adi Pradana, 2020), dan elite komunitas (Fadli et al., 2018) memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk persepsi dan pilihan politik masyarakat. Dalam banyak kasus, pemilih cenderung mengikuti arahan atau rekomendasi figur yang mereka percayai, alih-alih melakukan penilaian mendalam terhadap visi, program, atau rekam jejak kandidat. Kondisi ini menunjukkan bahwa rasionalitas pemilih bersifat situasional dan kontekstual, sangat bergantung pada tingkat literasi politik serta dinamika sosial yang berkembang di lingkungan tempat pemilih tersebut berada.

Banyak peneliti belum memberikan sorotan tajam terhadap hubungan antara literasi politik dan rasionalitas pemilih dalam konteks lokal, meskipun kajian partisipasi politik di Indonesia telah berkembang luas. Namun, penelitian cenderung berfokus pada tingkat partisipasi pemilih atau pola perilaku memilih secara umum, sementara dimensi yang berkaitan dengan kapasitas kognitif,

pemahaman politik, serta kemampuan pemilih dalam menilai pilihan politiknya sering kali luput dari analisis yang mendalam. Padahal, aspek-aspek tersebut memiliki peran penting dalam menentukan kualitas keputusan politik yang diambil oleh warga negara (Novandika & Riyanti, 2024).

Kajian-kajian terdahulu tentang perilaku pemilih di Indonesia cenderung menekankan aspek partisipasi politik dan tingkat kehadiran pemilih secara lebih mendalam (Suwenda & Nyoman Diah Utari Dewi, 2024), sementara hubungan antara literasi politik dan rasionalitas pemilih pada konteks lokal masih relatif kurang mendapat perhatian empiris yang mendalam. Secara khusus, belum banyak penelitian yang memotret bagaimana keterbatasan literasi politik memengaruhi dasar pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan legislatif di tingkat kota, terutama di kawasan Indonesia timur. Kondisi ini mengindikasikan adanya celah penelitian yang signifikan, sekaligus membuka peluang untuk memperkaya diskursus mengenai perilaku pemilih dan penguatan demokrasi di tingkat lokal di Indonesia.

Bertolak dari latar belakang tersebut, artikel ini diarahkan untuk mengkaji tingkat literasi politik masyarakat serta keterkaitannya dengan rasionalitas pemilih dalam Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 di Kota Sorong. Literasi politik diposisikan sebagai elemen penting untuk memahami bagaimana warga menafsirkan informasi politik, menilai figur kandidat, dan akhirnya menentukan pilihan politiknya. Melalui analisis ini, artikel ini diharapkan tidak hanya memperkaya diskursus teoretis mengenai perilaku pemilih, tetapi juga memberikan pijakan praktis bagi upaya penguatan pendidikan politik dan peningkatan kualitas demokrasi di tingkat lokal, terutama di kawasan Indonesia bagian timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang diarahkan untuk memahami tingkat literasi politik masyarakat serta bagaimana literasi tersebut tercermin dalam rasionalitas pemilih pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 di Kota Sorong. Pendekatan ini dipilih karena dinilai paling tepat untuk memberikan gambaran empiris yang utuh dan terstruktur mengenai cara masyarakat memahami isu-isu politik sekaligus dasar pertimbangan yang digunakan pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Dengan sifatnya yang deskriptif, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menguji hubungan sebab-akibat

secara statistik, melainkan untuk memotret kecenderungan, karakteristik, dan pola perilaku pemilih. Fokus utama penelitian diletakkan pada pemetaan literasi politik dan rasionalitas pemilih sebagai fenomena sosial yang berkembang dalam dinamika demokrasi lokal di Kota Sorong.

Subjek penelitian adalah masyarakat Kota Sorong yang memiliki hak pilih dan terdaftar sebagai pemilih pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik non-probability sampling dengan pendekatan accidental sampling, yaitu responden dipilih berdasarkan kemudahan akses dan kesediaan untuk berpartisipasi dalam penelitian. Teknik ini digunakan karena keterbatasan kerangka sampel yang lengkap serta mempertimbangkan kondisi geografis dan sosial masyarakat Kota Sorong. Responden berasal dari latar belakang sosial yang beragam, mencakup variasi usia, tingkat pendidikan, pekerjaan, dan wilayah tempat tinggal, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai literasi politik dan rasionalitas pemilih di tingkat lokal.

Penentuan jumlah responden dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus Slovin, dengan mempertimbangkan jumlah populasi pemilih di Kota Sorong pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 serta tingkat kesalahan (margin of error) sebesar 5 persen. Penggunaan rumus Slovin dimaksudkan untuk memperoleh jumlah responden yang memadai guna menggambarkan kecenderungan umum literasi politik dan rasionalitas pemilih pada tingkat kota. Berdasarkan perhitungan tersebut, diperoleh jumlah responden sebanyak 399 orang. Jumlah ini dinilai telah memenuhi kebutuhan penelitian deskriptif dan memungkinkan peneliti menangkap variasi pemahaman serta pertimbangan politik masyarakat tanpa dimaksudkan untuk melakukan generalisasi statistik yang bersifat inferensial.

Instrumen penelitian berupa kuesioner terstruktur yang disusun untuk menggali pemahaman responden mengenai literasi politik dan rasionalitas pemilih. Untuk menjaga validitas instrumen, penyusunan butir pertanyaan dilakukan dengan merujuk pada kajian literatur dan penelitian terdahulu, serta disesuaikan dengan konteks pemilihan legislatif di Indonesia. Reliabilitas instrumen diuji secara internal terhadap konsistensi jawaban responden, sehingga kuesioner dinilai layak digunakan sebagai alat pengumpulan data. Pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner dirancang untuk menangkap pemahaman substantif responden

mengenai fungsi lembaga legislatif, mekanisme pemilu, serta dasar pertimbangan dalam menentukan pilihan politik.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menyebarkan kuesioner kepada responden melalui dua cara, yakni secara langsung menggunakan kuesioner cetak dan secara daring melalui platform Google Form. Pendekatan ganda ini dipilih agar peneliti dapat menjangkau responden yang lebih beragam, sekaligus menyesuaikan dengan kondisi geografis Kota Sorong serta perbedaan tingkat akses dan pemanfaatan teknologi di kalangan masyarakat. Sebelum kuesioner dibagikan, responden terlebih dahulu diberikan penjelasan singkat mengenai tujuan penelitian, serta penegasan bahwa identitas dan jawaban yang diberikan akan dijaga kerahasiaannya. Proses pengumpulan data berlangsung dalam periode waktu tertentu hingga jumlah responden yang ditargetkan tercapai dan data yang diperoleh dianggap memadai untuk memberikan gambaran deskriptif mengenai tingkat literasi politik dan rasionalitas pemilih.

Analisis data dilakukan secara deskriptif dan interpretatif, dengan menafsirkan jawaban responden untuk mengidentifikasi pola literasi politik dan rasionalitas pemilih. Data hasil survei disajikan dalam bentuk distribusi dan persentase untuk memperjelas kecenderungan umum, kemudian diinterpretasikan secara kualitatif dalam kerangka demokrasi lokal. Fokus analisis diarahkan pada cara responden memahami peran lembaga legislatif, menilai kandidat, serta membangun pertimbangan politiknya. Dengan pendekatan ini, analisis tidak berhenti pada penyajian angka, tetapi menempatkan data tersebut sebagai dasar penjelasan substantif mengenai dinamika perilaku memilih masyarakat Kota Sorong.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Literasi Politik dan Rasionalitas Pemilih

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa tingkat literasi politik masyarakat Kota Sorong pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 masih tergolong rendah, khususnya terkait pemahaman substantif mengenai fungsi dan peran lembaga legislatif. Sebagian besar responden memang mengetahui bahwa anggota legislatif dipilih melalui mekanisme pemilihan umum, namun pemahaman tersebut belum diikuti oleh pengetahuan yang lebih mendalam. Dari total 399 responden, hanya sekitar 34 persen atau sebanyak 135 orang yang mampu

menjelaskan fungsi DPRD secara relatif utuh, meliputi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa literasi politik yang dimiliki masyarakat cenderung masih berada pada level prosedural, sehingga belum sepenuhnya mendukung terbentuknya proses pengambilan keputusan politik yang didasarkan pada pertimbangan rasional dan pemahaman kelembagaan yang memadai.

Keterbatasan literasi politik masyarakat tampak jelas dalam cara pemilih membangun rasionalitasnya ketika menentukan pilihan. Temuan survei menunjukkan bahwa hanya sekitar 28 persen responden, atau 111 dari total 399 orang, yang menjadikan program kerja serta rekam jejak kandidat sebagai dasar utama dalam memilih. Di luar kelompok tersebut, sebagian besar pemilih mengakui bahwa keputusan politik mereka lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan non-programatik, seperti kedekatan personal dengan kandidat, kesamaan identitas sosial, maupun dorongan dari lingkungan sekitar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa rasionalitas pemilih masih berada pada tingkat yang terbatas, karena pilihan politik belum sepenuhnya dibangun atas dasar penilaian yang kritis, rasional, dan berbasis pada informasi politik yang memadai.

Temuan mengenai rendahnya pemahaman substantif pemilih terhadap fungsi legislatif menunjukkan bahwa literasi politik masyarakat Kota Sorong masih berada pada level prosedural. Dalam perspektif teori demokrasi substantif, kondisi ini menandakan adanya kesenjangan antara partisipasi elektoral dan kapasitas deliberatif warga negara. Sebagaimana dikemukakan oleh pendekatan rasional dalam perilaku pemilih, rasionalitas tidak hanya ditentukan oleh kehadiran di bilik suara, tetapi oleh kemampuan pemilih untuk mengaitkan pilihan politik dengan kepentingan publik jangka panjang. Dengan demikian, rasionalitas pemilih dalam konteks ini tidak dapat dipahami sebagai rasionalitas ideal, melainkan sebagai rasionalitas terbatas (*bounded rationality*) yang dibentuk oleh keterbatasan informasi dan literasi politik.

Hubungan antara tingkat literasi politik dan rasionalitas pemilih tampak semakin nyata ketika responden diklasifikasikan berdasarkan pemahaman politik yang mereka miliki. Mereka yang memiliki literasi politik lebih baik cenderung memperlihatkan sikap memilih yang lebih rasional, antara lain dengan berupaya mencari informasi mengenai kandidat sebelum pemilu serta mempertimbangkan program dan gagasan yang ditawarkan dalam menentukan pilihan politiknya.

Sebaliknya, pada responden dengan literasi politik yang relatif rendah, keputusan politik umumnya diambil secara lebih pragmatis dan dipengaruhi oleh situasi sesaat. Temuan ini menegaskan bahwa literasi politik memainkan peran fundamental sebagai prasyarat bagi terbentuknya perilaku memilih yang rasional.

Ditinjau dari latar belakang pendidikan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendidikan formal memang berperan dalam membentuk tingkat literasi politik masyarakat, meskipun peran tersebut tidak bersifat determinan. Responden yang menempuh pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi cenderung memiliki pemahaman politik yang lebih memadai dibandingkan mereka yang hanya mengenyam pendidikan dasar. Namun, temuan ini sekaligus menegaskan bahwa pendidikan formal semata tidak serta-merta melahirkan pemilih yang rasional. Tanpa dibarengi dengan pendidikan politik yang kontekstual dan relevan dengan realitas sosial, individu tetap berpotensi mengambil keputusan politik yang bersifat pragmatis atau emosional, alih-alih didasarkan pada pertimbangan substantif. Dalam konteks ini, pendidikan politik menjadi penting karena diharapkan dapat membekali masyarakat dengan kemampuan untuk melakukan verifikasi informasi serta memilah berbagai berita dan wacana yang beredar terkait dinamika politik yang sedang berlangsung (Saputro, 2021).

Akses terhadap informasi politik memainkan peran yang tidak kalah penting dalam membentuk tingkat literasi politik dan rasionalitas pemilih. Individu yang terbiasa mencari dan mengikuti informasi politik, baik melalui media daring, media sosial, maupun ruang-ruang diskusi publik, umumnya memiliki pemahaman politik yang lebih memadai, sehingga pilihan politik yang diambil cenderung lebih rasional dan reflektif. Sebaliknya, keterbatasan dalam mengakses informasi politik dapat membatasi cakrawala pengetahuan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong ketergantungan pada sumber-sumber informasi informal. Kondisi ini berisiko melanggengkan penyebaran informasi yang parsial, tidak berimbang, bahkan bias dalam membentuk preferensi politik pemilih (Zahro et al., 2023)

Rendahnya tingkat literasi politik tampak berhubungan erat dengan sikap masyarakat yang cenderung permisif terhadap praktik politik transaksional. Dalam penelitian ini, tercatat sebanyak 183 responden menyatakan bahwa pemberian uang atau bantuan materi menjelang pemilu merupakan sesuatu yang dianggap wajar dan dapat diterima. Pandangan semacam ini terutama muncul pada kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman politik terbatas. Kondisi tersebut

mengindikasikan bahwa ketiadaan literasi politik yang memadai membuat sebagian pemilih memaknai pemilu lebih sebagai ruang pertukaran kepentingan jangka pendek, alih-alih sebagai sarana demokratis untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan kepentingan publik secara lebih luas (Fitriyah et al., 2021).

Peran tokoh-tokoh lokal terbukti memiliki pengaruh yang cukup besar dalam membentuk cara masyarakat menilai dan menentukan pilihan politiknya, terutama di kalangan warga dengan tingkat literasi politik yang masih terbatas. Banyak responden menyampaikan bahwa pandangan dan rekomendasi yang diberikan oleh tokoh adat, pemuka agama, maupun elite komunitas sering kali menjadi rujukan utama dalam mengambil keputusan politik. Kondisi ini menunjukkan bahwa pilihan politik masyarakat tidak selalu lahir dari proses pertimbangan rasional secara individual, tetapi juga dipengaruhi oleh ikatan sosial, norma komunitas, serta relasi kekuasaan informal yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari.

Dampak rendahnya literasi politik tidak berhenti pada fase pemilu semata, tetapi juga tercermin dalam perilaku politik masyarakat setelah proses pemilihan selesai. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa hanya 95 responden yang menyatakan pernah memantau atau mengetahui kinerja anggota legislatif pasca-pemilu. Sebagian besar responden mengaku tidak mengikuti perkembangan kebijakan maupun aktivitas wakil rakyat yang telah mereka pilih. Fakta ini mengindikasikan bahwa keterbatasan literasi politik tidak hanya memengaruhi kualitas pertimbangan pemilih dalam menentukan pilihan elektoral, tetapi juga berkontribusi pada melemahnya fungsi pengawasan publik serta rendahnya tingkat akuntabilitas politik setelah pemilu berlangsung.

Jika dilihat dari sudut pandang demokrasi substantif, temuan ini menunjukkan bahwa rasionalitas pemilih tidak berdiri sendiri, melainkan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kognitif serta tingkat pemahaman politik yang dimiliki masyarakat. Literasi politik, dalam konteks ini, menjadi landasan penting yang membantu warga negara memahami, menimbang, dan mengevaluasi pilihan-pilihan politik secara lebih kritis dan bertanggung jawab. Ketika literasi politik berada pada tingkat yang rendah, proses memilih sering kali bergeser ke arah yang bersifat pragmatis dan personalistik, sehingga upaya untuk membangun kualitas representasi politik yang lebih matang dan substantif menghadapi berbagai keterbatasan.

Secara umum, hasil analisis dan pembahasan dalam penelitian ini memperlihatkan adanya keterkaitan yang kuat antara tingkat literasi politik dan

rasionalitas pemilih pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 di Kota Sorong. Data persentase yang digunakan untuk menampilkan temuan-temuan utama tidak hanya berfungsi sebagai pendukung empiris, tetapi juga membantu memperjelas pola hubungan tersebut secara lebih konkret. Rendahnya literasi politik tampak berimplikasi langsung pada lemahnya kemampuan pemilih dalam mengambil keputusan politik secara rasional. Oleh karena itu, temuan ini menegaskan bahwa upaya penguatan literasi politik menjadi aspek yang krusial dalam mendorong kualitas demokrasi lokal, agar partisipasi politik masyarakat tidak berhenti pada aspek angka semata, melainkan juga mencerminkan kedewasaan dan kesadaran politik yang lebih substantif.

Literasi Politik dan Rasionalitas Pemilih dalam Demokrasi Lokal

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa literasi politik memegang peranan penting dalam membentuk cara pemilih bersikap dan mengambil keputusan pada pemilihan legislatif. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai peran lembaga legislatif serta mekanisme dasar proses politik mengindikasikan bahwa praktik demokrasi elektoral di tingkat lokal masih lebih menekankan aspek prosedural dibandingkan substansi demokrasi itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, kehadiran pemilih di tempat pemungutan suara dan penggunaan hak pilih belum sepenuhnya diiringi oleh kemampuan untuk menilai pilihan politik secara kritis dan reflektif. Hal ini menegaskan bahwa rasionalitas pemilih tidak dapat dipandang hanya sebagai hasil keputusan individual semata, melainkan merupakan cerminan dari proses pembelajaran politik yang berlangsung secara terbatas dan belum berkembang secara optimal.

Hubungan antara literasi politik dan rasionalitas pemilih yang ditunjukkan dalam penelitian ini menegaskan bahwa pemilih rasional tidak dapat dipahami sebagai asumsi yang bersifat universal dalam demokrasi elektoral. Sebaliknya, rasionalitas tersebut terbentuk melalui proses sosial dan institusional yang memengaruhi cara warga memahami dan menilai pilihan politik yang tersedia (Fernandes et al., 2023). Pemilih yang memiliki tingkat literasi politik lebih baik cenderung menjadikan program kerja serta rekam jejak kandidat sebagai landasan utama dalam menentukan pilihan. Sementara itu, pemilih dengan literasi politik yang lebih rendah umumnya masih menggantungkan preferensinya pada pertimbangan non-programatik. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa rasionalitas politik bersifat bertingkat dan sangat kontekstual, karena sangat

dipengaruhi oleh akses individu terhadap informasi politik serta kapasitasnya dalam mengolah dan memaknainya.

Dalam kerangka demokrasi substantif, tingkat literasi politik masyarakat memiliki kaitan yang erat dengan mutu representasi politik yang dihasilkan. Ketika pemilih tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai fungsi, peran, dan tanggung jawab wakil rakyat, relasi antara warga dan legislator cenderung bersifat sesaat dan berakhir pada proses pemungutan suara semata. Kondisi ini membuat pemilih kesulitan merumuskan harapan yang konkret terhadap kinerja para wakilnya, sehingga praktik pengawasan dan penagihan pertanggungjawaban politik tidak berjalan secara optimal. Akibatnya, demokrasi berpotensi mengalami reduksi makna dan hanya beroperasi sebagai prosedur elektoral rutin, tanpa disertai keterlibatan publik yang kritis dan berkelanjutan.

Pembahasan ini mengindikasikan bahwa pendidikan formal belum dapat dipandang sebagai satu-satunya faktor penentu dalam membentuk pemilih yang rasional. Walaupun tingkat pendidikan memiliki peran dalam meningkatkan pemahaman individu terhadap isu-isu politik, peningkatan tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan tumbuhnya rasionalitas dalam menentukan pilihan politik. Temuan ini menegaskan bahwa literasi politik merupakan proses yang lebih kompleks, yang tidak hanya dibangun melalui jalur pendidikan formal, tetapi juga diperkaya oleh pengalaman pendidikan politik non-formal yang kontekstual, seperti keterlibatan dalam diskusi publik, aktivitas sosialisasi politik, serta pengalaman langsung masyarakat dalam praktik demokrasi sehari-hari (Kurniawan et al., 2022)

Akses terhadap informasi politik memegang peran krusial dalam membentuk tingkat literasi politik sekaligus rasionalitas pemilih. Ketika masyarakat berada dalam lingkungan informasi yang terbatas, atau ketika arus informasi lebih banyak didominasi oleh sumber-sumber informal, ruang bagi refleksi dan pertimbangan politik yang kritis menjadi semakin menyempit. Dalam situasi seperti ini, pemilih cenderung lebih mudah dipengaruhi oleh narasi politik yang sederhana, arahan tokoh-tokoh lokal, maupun praktik politik transaksional. Di Indonesia, politik transaksional terbukti berkontribusi pada lahirnya elite-elite politik yang korup dan menjauhkan demokrasi dari tujuan idealnya, karena pilihan politik warga sering kali dibentuk melalui insentif finansial dan materi (Sudjana Ermaya, 2022). Temuan ini menegaskan bahwa rasionalitas pemilih tidak dapat dipahami secara terpisah dari kualitas dan ekosistem informasi politik yang tersedia, khususnya di tingkat lokal.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat literasi politik masyarakat turut berperan dalam menguatnya praktik politik transaksional yang kian dianggap wajar. Dalam kondisi ketika pemilih tidak memiliki pemahaman yang memadai mengenai konsekuensi jangka panjang dari pilihan politik yang diambil, proses pemilu sering kali dipersepsikan semata-mata sebagai ruang untuk memperoleh manfaat langsung atau keuntungan sesaat (Harnom et al., 2019). Situasi semacam ini tidak hanya berdampak pada menurunnya kualitas rasionalitas pemilih, tetapi juga secara perlahan mengikis nilai-nilai dasar demokrasi, karena relasi antara pemilih dan kandidat lebih didasarkan pada logika pertukaran pragmatis daripada pada representasi kepentingan publik yang substantif.

Dalam kehidupan sosial masyarakat Kota Sorong, pengaruh tokoh-tokoh lokal dan keberadaan struktur sosial yang bersifat informal memainkan peran penting dalam menjembatani hubungan antara tingkat literasi politik dan cara pemilih mengambil keputusan. Tokoh adat, pemuka agama, serta elite komunitas kerap dipandang sebagai figur yang memiliki otoritas moral dan sosial, sehingga pandangan mereka menjadi rujukan utama, khususnya bagi warga yang akses dan pemahaman politiknya masih terbatas. Kondisi ini memperlihatkan bahwa rasionalitas pemilih tidak selalu bersifat individual, melainkan terbentuk secara kolektif melalui norma, nilai, dan relasi sosial yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, upaya peningkatan literasi politik tidak dapat dilepaskan dari pemahaman atas konteks sosial dan budaya lokal yang melingkupinya.

Secara umum, pembahasan ini menunjukkan bahwa literasi politik memiliki peran yang sangat menentukan dalam membentuk pemilih yang rasional sekaligus mendorong terwujudnya demokrasi lokal yang lebih bermutu. Tingginya partisipasi dalam pemilu, apabila tidak disertai dengan penguatan literasi politik, belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas demokrasi itu sendiri. Karena itu, pembangunan demokrasi yang bersifat substantif di tingkat lokal seharusnya tidak hanya berfokus pada aspek keikutsertaan warga, tetapi juga pada upaya memperkuat kapasitas pengetahuan dan kesadaran politik masyarakat. Dengan pendekatan tersebut, partisipasi politik yang terjadi tidak sekadar bersifat kuantitatif, melainkan juga mencerminkan kemampuan pemilih dalam mengambil keputusan politik secara rasional, kritis, dan bertanggung jawab.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang umumnya menempatkan literasi politik sebagai faktor penentu partisipasi pemilih, penelitian ini memberikan

kontribusi empiris dengan menekankan keterkaitan langsung antara literasi politik dan kualitas rasionalitas pemilih pada konteks pemilihan legislatif di wilayah Indonesia bagian timur. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya literasi politik tidak hanya berdampak pada pilihan elektoral yang non-programatik, tetapi juga berimplikasi pada lemahnya pengawasan politik pasca-pemilu. Berbeda dari studi-studi sebelumnya yang cenderung memusatkan perhatian pada perilaku memilih saat pemilu, artikel ini menegaskan bahwa rasionalitas pemilih perlu dipahami sebagai proses berkelanjutan yang dipengaruhi oleh literasi politik sebelum dan setelah pemilu. Dengan demikian, novelty penelitian ini terletak pada pengayaan perspektif empiris mengenai literasi politik sebagai fondasi rasionalitas pemilih dalam demokrasi lokal.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tingkat literasi politik masyarakat Kota Sorong pada Pemilihan Anggota Legislatif Tahun 2019 masih relatif terbatas, khususnya dalam pemahaman substantif mengenai fungsi dan peran lembaga legislatif. Keterbatasan literasi politik tersebut berimplikasi pada rendahnya rasionalitas pemilih, yang tercermin dari belum dominannya pertimbangan program kerja dan rekam jejak kandidat dalam menentukan pilihan politik.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada penegasan bahwa literasi politik merupakan faktor kunci dalam membentuk rasionalitas pemilih dan kualitas demokrasi lokal. Temuan ini menunjukkan bahwa tingginya partisipasi pemilih tidak dapat dijadikan satu-satunya indikator kualitas demokrasi apabila tidak disertai dengan kapasitas pemilih dalam memahami dan mengevaluasi pilihan politik secara rasional. Oleh karena itu, penguatan literasi politik menjadi prasyarat penting bagi pengembangan demokrasi lokal yang lebih substantif.

Saran

1. Penguatan literasi politik substantif Pemerintah daerah, penyelenggara pemilu, dan partai politik perlu mengembangkan pendidikan politik yang menekankan pemahaman substantif mengenai fungsi dan peran lembaga legislatif, rasionalitas memilih, serta konsekuensi politik dari pilihan elektoral.

2. Pengembangan pendidikan politik yang berkelanjutan dan kontekstual. Pendidikan politik tidak hanya difokuskan pada tahapan dan prosedur pemilu, tetapi juga diarahkan pada peningkatan kemampuan masyarakat dalam menilai program, rekam jejak kandidat, dan kinerja wakil rakyat setelah pemilu berlangsung.
3. Diperlukan penyediaan informasi politik yang akurat, mudah diakses, dan relevan dengan konteks lokal guna meningkatkan literasi politik masyarakat serta mengurangi ketergantungan pada sumber informasi informal yang bersifat parsial dan bias sebagai upaya untuk penguatan ekosistem informasi politik di tingkat lokal.
4. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan komparatif antarwilayah atau metode penelitian yang lebih beragam guna memperdalam pemahaman mengenai hubungan antara literasi politik, rasionalitas pemilih, dan kualitas demokrasi lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Adi Pradana, M. Y. (2020). Relasi Kuasa Politik Tokoh Agama Dalam Hegemoni Pemilukada 2020. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*, 3(2). <https://doi.org/10.14421/lijid.v3i2.2418>
- Anshori, A., Rudianto, & Jehan Ridho Izharsyah. (2023). Dampak Literasi Politik dan Pemilu 2024 Bagi Pemilih Pemula terhadap Pengendalian Informasi Hoax. *Jurnal Audiens*, 4(1), 86–97. <https://doi.org/10.18196/jas.v4i1.8>
- Ansori, Z., & M.Si., A. (2019). Rasionalitas Partai Politik dalam Penentuan Calon Anggota Legislatif Lombok Tengah Tahun 2019. *Politea : Jurnal Politik Islam*, 2(2), 49–66. <https://doi.org/10.20414/politea.v2i2.1364>
- Arfan, M. A. J. (2021). *Hubungan Antara Si Wakil dengan yang Diwakilkan*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/ub5w6>
- Arniti, N. K. (2020). Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Legislatif Di Kota Denpasar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(2), 329. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i2.2496>
- Bungin, B., Teguh, M., Danu Kristianto, B. R., Liliek Senaharjanta, I., & Sulistijanto, A. B. (2025). Konstruksi Sosial Tokoh Lokal di Pilkada 2024: Peran Media, Simbol Budaya, Dan Dinamika Interaksi Sosial. *COMSERVA: Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 4(12), 5361–5372. <https://doi.org/10.59141/comserva.v4i12.3070>
- Fadli, M., Bailusy, Muh. K., Nas, J., & Zulfikar, A. (2018). Keterlibatan Elit Lokal dalam Peningkatan Partisipasi Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toraja Utara Tahun 2015. *ARISTO*, 6(2), 301. <https://doi.org/10.24269/ars.v6i2.1025>
- Farikiansyah, I. M., Salamah, M. N., Rokhimah, A., Ma'rifah, L., Faruq, F. N. F., & Al Gufron, M. A. (2024). Meningkatkan Partisipasi Pemilu melalui Literasi Politik Pemuda Milenial dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Journal of Education Research*, 5(4), 6512–6523. <https://doi.org/10.37985/jer.v5i4.793>

- Fernandes, R., Ananda, A., Montessori, M., Putra, E. V., & Tiara, M. (2023). Efektivitas Pendidikan Pemilih Intrakurikuler Dalam Mata Pelajaran Sosiologi Untuk Membentuk Ketahanan Demokrasi (Studi Pada Siswa SMAN 7 Sekolah Penggerak, Kota Padang, Sumatra Barat). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 29(1), 18. <https://doi.org/10.22146/jkn.82319>
- Fitriyah, F., Alfirdaus, L. K., & Manar, D. G. (2021). Partisipasi Politik dan Pemilih Muda: Konteks Pilgub Jateng 2018 dan Pilkada 2019 di Kabupaten Temanggung. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*, 12(1), 1–10. <https://doi.org/10.14710/politika.12.1.2021.1-10>
- Harnom, F., Syahrizal, S., & Valentina, T. R. (2019). Pendidikan Politik Bagi Pemilih Milenial Dalam Memahami Bahaya Vote Broker Oleh KPU. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.31604/jips.v6i1.2019.1-10>
- Hasanuddin, H., Rizaldi, A., Marta, A., & Ishak, I. (2021). Kesenjangan Angka Partisipasi Pemilih. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 37–45. <https://doi.org/10.35967/njip.v20i2.219>
- Irlandi, I. A., Normansyah, A. D., & Sukarlina, L. (2023). Pengaruh Tokoh Masyarakat terhadap Partisipasi Politik Masyarakat pada Pemilihan Kepala Desa. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(10), 333–339. <https://doi.org/10.56393/decive.v3i10.1721>
- Kurniawan, R. C., Indrajat, H., Kurniawan, B., & Dwijono, A. T. (2022). Pendidikan Demokrasi bagi Pelajar dan Mahasiswa di Kota Bandar Lampung dalam Menciptakan Literasi Politik. *Jurnal Pengabdian Dharma Wacana*, 3(1), 23–34. <https://doi.org/10.37295/jpdw.v3i1.273>
- Latif, I. R., Afriandi, F., Saputra, I. M., Marefanda, N., Marlizar, D., Sari, N., Iqbal Aziz, C., Fahlevi, R., Alqarni, W., & Akbar, A. (2025). Songsong Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2024: Upaya Penguatan Literasi Politik bagi Pemilih Pemula di Takengon, Aceh Tengah. *MEUSEURAYA - Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 25–41. <https://doi.org/10.47498/meuseuraya.v4i1.4523>
- Malik, A., Syaripuddin, S., & Harianto, H. (2022). Voter's Education dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Pemula di Desa Duampanua. *SIPISSANGNGI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 18. <https://doi.org/10.35329/sipissangngi.v2i1.2844>
- Novandika, B., & Riyanti, R. (2024). Pemilu dan Partai Politik: Pendidikan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda. *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 1–6. <https://doi.org/10.70437/themis.v2i1.851>
- Putri, N. E. (2017). Dampak Literasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu. *Jurnal Agregasi: Aksi Reformasi Government Dalam Demokrasi*, 5(1). <https://doi.org/10.34010/agregasi.v5i1.219>
- Rahmatullah, R., Hendrawan, H., Taufiq, M. S., Saputra, A. N., Ikhsan, T., Kusmin, A. F., Yusri, M., & Prayetno, B. (2025). Literasi Demokrasi Desa Kalumammang Kec.Alu, Kab. Polewali Mandar. *Room of Civil Society Development*, 4(3), 487–497. <https://doi.org/10.59110/rcsd.644>
- Saputro, R. H. (2021). Pendidikan Politik Sebagai Amanat Undang-Undang. *Journal Civics and Social Studies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.31980/journalcss.v5i1.150>
- Sudjana Ermaya, B. (2022). Perilaku Politik Transaksional Dan Biaya Tinggi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1(2), 51–60. <https://doi.org/10.55108/jkp.v1i2.171>

- Suwenda, I. G. S., & Nyoman Diah Utari Dewi. (2024). Upaya Meningkatkan Partisipasi Pemilih Melalui Literasi Politik Berbasis Digital Pada Pemilihan Umum di Kabupaten Karangasem. *Journal of Contemporary Public Administration (JCPA)*, 4(1), 16–22. <https://doi.org/10.22225/jcpa.4.1.2024.16-22>
- Zahro, S., Miladia Nur Kamilah, Muhammad Ardiansyah, Isabna Maghfirotus Safitri, Putri Sofina Naharina, & Alfiana Nanda Waraswati. (2023). Kesadaran Berpolitik Di Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 1(2), 49–64. <https://doi.org/10.60153/jocer.v1i2.34>